

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan umum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Kurator yang mengatur syarat-syarat untuk mendaftar sebagai kurator dan pengurus

BUKU

Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2006. *Hukum Bisnis Untuk*

Andi Hartanto, 2021. *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. laksBang Justitia, Yogyakarta.

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007)

Black, Henri Campbell, dalam Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara).

Darus Badruzaman Mariani. (1977). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni

Derita Prapti Rahayu, 2020, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Djarmiko, 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Fred B. G Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudhi A. Lontoh, Alumni Bandung, 2001
- H. Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006).
- H.Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Husni Hasbullah Frieda. (2009). *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Indo Hill-Co
- Ivinda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta : LaksBank PRESSindo.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, Cristine S.T. Kansil, 2006. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Mulyadi. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau PKPU*. Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Bahsan. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3, Jakarta: Rajawali.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Muhamad Said Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Perusahaan, Teori & contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Jilid I*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 195
- Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Khususnya dalam Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006).
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994).
- Sopha Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta 1980.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: Kencana, 2017).
- Sutan Remy Sjahdeini (1), *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening juncto Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1994).

JURNAL

Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

Sri Redjeki Slamet. (2010) “Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditor”. Jurnal Hukum Lex Jurnalika Vol. 7 No. 3 Agustus.

Putu Arya Aditya Pramana, 2013, Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.4.

KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN

Meidita Andriani, *“Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak Membayar Utangnya”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

Maryana, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Hukum Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016)